**OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**Tugas ini disusun untuk memenuhi**

**Tugas Mata kuliah Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik**

**Dosen :**

****

**Disusun Oleh**

**UMMI MAHBUBAH, S.H.I**

**NIM 2014-02-014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

1. **Otonomi daerah merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintahan Republik Indonesia dimana urusan pemerintahan dapat diselengaran dekat dengan masyarakatnya. Jelaskan mengapa otonomi daerah diperlukan dalam Negara Kesatuan!**

Jawaban : Otonomi daerah dan NKRI mempunyai hubungan sinergi yang kuat. Karena otonomi daerah merupakan sebuah sistem untuk menopang keutuhan negara Indonesia ini yang mempunyai kemajemukan. Otonomi daerah menjadi poin penting karena daerah akan leluasa mengelola daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat secara utuh. Wujud memberikan kemandirian inilah yang mendorong Indonesia bisa bertahan tetap menjadi satu kesatuan meskipun memiliki suku, agama dan adat yang bermacam-macam. NKRI menjadi modal utama menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju dan berkembang yang bebas atas konflik berkepanjangan yang bersifat kesukuan keagamaan dan keadatan. Akan tercipta keutuhan yang progresif dengan adanya otonomi daerah yang bisa disebut menghargai tiap-tiap daerah untuk mandiri tanpa harus lepas dari negara kesatuan republik Indonesia.

( Baca: *“Otonomi Daerah Wujud Keutuhan NKRI”,* lihat di http://hankam.kompasiana.com/2013/11/03/otonomi-daerah-wujud-keutuhan-nkri-604816.html).

1. **Daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Uraikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah berasal pemerintahan pusat yang mendasarkan teori apa saja!**

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu : **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Dekonsentrasi** merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

**Tugas perbantuan** yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah & atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan & mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

( Baca: *“Sistem Pemerintahan Daerah”,* lihat di http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html).

1. **Pasal 18,18 A,18 B Undang Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia mengatur tentang pemerintahan daerah,pemerintahan daerah istimewa dan daerah Khusus serta kesatuan masyarakat hukum adat. Terangkan kesamaan dan perbedaan ketiganya serta diberikan contoh kongkritnya.**
2. **Dalam pemerintahan Jokowi sekarang ini terjadi pergantian nama kementrian diantaranya kementrian Agraria dan Tata ruang serta kementrian Desa,Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Jelaskan dampak terhadap adanya pergantian nama kementrian tersebut!**
3. **Otonomi Daerah dan Kebijakan publik sangat berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jelaskan kaitan keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan.**

**DAFTAR PUSTAKA**

*“Faktor-Faktor Penyebab Pelacuran”* lihat di http://www.e-jurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html.

*“ Makalah Pelacuran Sebagai Masalah Sosial Ditinjau Dari Perspektif Krimonologi”.* Lihat di <http://il-pustakawanhukum.blogspot.com/2014/03/makalah-pelacuran-sebagai-masalah.html>.

*“ Pelacuran”* lihat di <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>.

*“Prostitusi”* lihat di http://sobatbaru.blogspot.com/2009/02/prostitusi.html